



## Giliran Berkas Dua Tersangka Lain Dilimpahkan ke Kejari

Negara (Bali Post) -

Setelah terdakwa Indah Suryaningsih, PNS di Dinas Sosial Jembrana divonis empat tahun penjara di Pengadilan Tipikor Denpasar belum lama ini, kasus korupsi program santunan kematian tahun 2015 kini masih berlanjut. Dua tersangka lainnya, yakni oknum klian dinas, berkasnya telah dilimpahkan (tahap I) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana.

Dua tersangka tersebut ikut bekerja sama dalam proses pembuatan data fiktif warga yang meninggal untuk mendapatkan santunan. Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Jembrana beberapa waktu telah melimpahkan berkas perkara dua tersangka, yakni berinisial IGA dan IDKA, keduanya oknum klian banjar di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya.

Kasi Pidsus Kejari Jembrana Ivan Praditya Putra saat dikonfirmasi, Jumat (24/8) kemarin, membenarkan telah menerima pelimpahan dua tersangka tersebut. Jaksa juga telah meneliti berkasnya dan masih belum lengkap.

"Sudah P-18 (hasil penyelidikan belum lengkap). Untuk P-19 (pengembalian berkas) kita lakukan minggu depan," ujarnya.

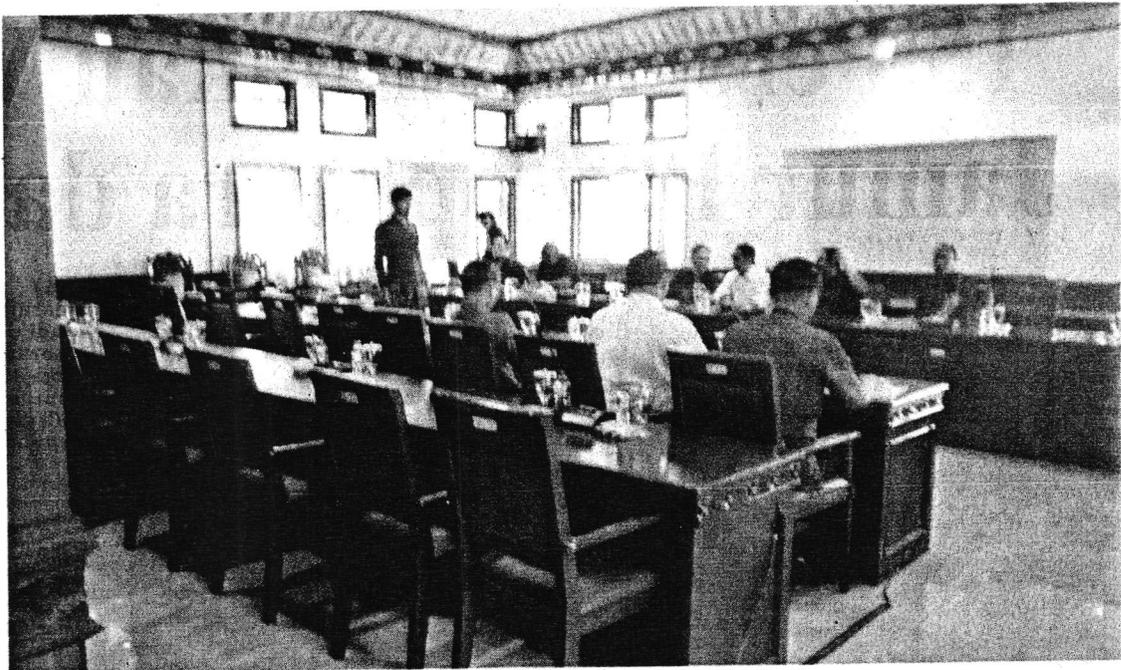
Ivan Praditya tidak merinci apa yang kurang dalam berkas yang dilimpahkan tersebut. Yang jelas P-19 dilakukan minggu depan. Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi santunan kematian ini disinyalir dilakukan secara bersama. Melibatkan PNS di Dinas Sosial dan sejumlah klian dinas yang mengajukan permohonan. Indah Suryaningsih, sudah divonis bersalah dengan hukuman empat tahun pidana penjara serta membayar uang pengganti Rp 171 juta.

Jaksa memilih banding dikarenakan uang pengganti tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebesar Rp 239 juta. Ada beberapa klian banjar dan kepala lingkungan (kaling) yang diketahui melakukan pemalsuan data penerima santunan. Pada tahun 2015 lalu, jumlah anggaran yang dicairkan Dinas Sosial untuk santunan kematian mencapai Rp 3.580.500.000 dengan 2.387 warga sebagai penerima.

Tetapi dari penyelidikan, ada lebih dari 200 berkas direkayasa dengan total nilai sebesar Rp 363 juta. Selanjutnya pengajuan santunan kematian atas nama almarhum/ almarhumah dengan menggunakan data-data yang sudah pernah, duplikasi pembayaran (pengajuan berulang sampai yang kedua atau ketiga) hingga puluhan berkas. Indah bekerja sama dengan oknum klian banjar dan kaling sehingga mendapatkan uang lebih. (kmb26)

Edisi : Sabtu, 25 Agustus 2019

Hal : 10



Bali Post/kmb28

RAPAT KERJA - *Komisi IV DPRD Tabanan menggelar rapat kerja dengan Koni Tabanan.*

Komisi IV Rapat Kerja dengan KONI

## Anggaran Porprov Rp 30 Miliar

Tabanan (Bali Post) -

Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali 2019 sudah kian dekat. Sejumlah persiapan telah dilakukan, baik oleh KONI Tabanan bersama panitia induk persiapan Porprov. Guna mengetahui kesiapan pelaksanaan Porprov termasuk masalah penganggaran, Komisi IV DPRD Tabanan melakukan rapat kerja dengan KONI Tabanan, Dinas Pendidikan serta Bapelitbang, Kamis (23/8) kemarin.

Ketua komisi IV DPRD Tabanan I Made Dirga mengatakan, rapat kerja ini untuk mengetahui perkembangan persiapan pelaksanaan Porprov tahun 2019. Baik itu kesiapan penyelenggaraan, venue, anggaran termasuk kesiapan atlet Tabanan.

Dikatakan, pihaknya juga ingin mengetahui anggaran yang diperlukan baik untuk penyelenggaraan Porprov, kesiapan untuk venue maupun kesiapan atlet. Bahkan pihaknya akan turun untuk mengecek venue-venue yang akan digunakan dalam 38 cabor yang akan dipertandingkan.

Anggota Komisi IV Nyo-

man Suadiana lebih menyoroti tentang kesiapan atlet Tabanan yang akan diterjunkan di Porprov, termasuk target yang ingin diraih baik pencapaian medali maupun peringkat. Pihaknya berharap Tabanan mampu meraih prestasi yang lebih baik dari Porprov sebelumnya.

Ketua KONI Tabanan I Dewa Gede Ary Wirawan menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk penyelenggaraannya. Terkait venue dikatakan akan dilangsungkan di seluruh kecamatan kecuali Selemadeg Barat. Selain itu

juga sedang dibangun GOR berstandar nasional tipe B di kompleks Stadion Debes. Sementara venue lain akan disebar di seluruh kecamatan. "Dengan konsep sport, *tourism and culture*, kami akan mencoba melibatkan masyarakat secara langsung dalam berbagai event olahraga di Porprov," katanya.

Pihaknya juga sudah melakukan pendataan venue yang akan dipergunakan. Selain itu, juga melakukan Bintek untuk Cabor agar siap menyelenggarakan pertandingan. Begitupun dengan atlet sudah dipersiapkan di Cabor masing-

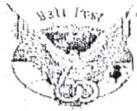
masing. Diakui, untuk venue perlu banyak pembenahan seperti soal toilet. Begitu juga dengan penyediaan venue untuk panjat tebing serta menembak yang sedang diupayakan.

Sementara terkait target, pihaknya berharap bisa meraih medali emas sekitar 20 agar mampu meningkatkan prestasi dan peringkat dari Porprov sebelumnya.

Bendahara KONI I Nyoman Budiarta menyebutkan anggaran untuk kegiatan Porprov baik untuk penyelenggaraan maupun kesiapan Tabanan selaku peserta dibutuhkan anggaran sekitar Rp 30 miliar. Dari jumlah tersebut, bantuan dari KONI Bali sebesar Rp 6 miliar untuk penyelenggaraan sehingga Pemkab harus menyisipkan anggaran sekitar Rp 24 miliar. (kmb28)

Edisi : dawat, 24 Agustus 2018

Hal : 7



## Pembangunan Gedung di RSUD Dilanjutkan

**Bangli (Bali Post) –**

Gedung berlantai tiga di RSUD Bangli yang mangkrak sejak lebih dari sepuluh tahun lalu, kini dilanjutkan kembali pembangunannya. Rencananya, sebagian ruangan di gedung tersebut akan dimanfaatkan untuk ruang pelayanan khusus sulinggih. Melanjutkan pembangunan gedung tersebut, anggaran yang disiapkan mencapai Rp 4 miliar.

Berdasarkan pantauan Kamis (23/8) kemarin, proyek pembangunan gedung yang lokasinya berada di selatan areal RSUD itu kini sedang dalam tahap pengerjaan. Sesuai papan proyek yang terpasang di dekat lokasi, pengerjaannya dilakukan oleh PT Karya Dinamis Mesari. Lama waktu pengerjaan selama 135 hari mulai 24 Juli 2018.

Direktur RSUD Bangli dr. Wayan Sudiana saat dikonfirmasi kemarin mengatakan, dilanjutkannya kembali pembangunan gedung tersebut untuk pengembangan ruang pelayanan mahotama. Rencananya, pada lantai satu dan dua gedung itu akan dimanfaatkan sebagai ruang pelayanan pasien khusus sulinggih. Sementara pada

lantai tiganya akan dimanfaatkan untuk ruangan pendidikan.

Dijelaskan lebih lanjut, ruang pelayanan untuk pasien sulinggih disediakan sebagai bentuk penghargaan Pemkab Bangli terhadap para sulinggih. Dengan adanya gedung tersebut, nantinya pasien sulinggih, yang membutuhkan perawatan ataupun

penanganan darurat akan langsung ditangani di sana tanpa harus dibawa ke IGD. "Selama ini sulinggih masih dirawat berbau. Penyediaan ruang ini merupakan ide Bapak Bupati sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap sulinggih," jelasnya.

Dengan dilanjutkannya kembali pembangunan gedung tersebut, maka total jumlah ruang pelayanan Mahotama yang dimiliki RSUD Bangli nantinya menjadi 17 unit dari yang sebelumnya hanya 7 unit. Sudiana menambahkan setelah proyek pembangunan sele-

sai, pihaknya mengupayakan melengkapi sejumlah sarana kesehatan di dalamnya seperti tempat tidur dan sebagainya, pada tahun anggaran perubahan. "Targetnya pembangunannya selesai bulan November," ujarnya.

Selain melanjutkan pembangunan gedung mangkrak, RSUD Bangli pada tahun ini juga tengah membangun gedung areal utara RSUD dengan nilai Rp 1,7 miliar. Pembangunan gedung berlantai tiga tersebut rencananya akan difungsikan untuk ruangan manajemen. (kmb40)

Edisi : Jumat, 24 Agustus 2018  
Hal : 19



## Kasus Dugaan Penipuan CPNS Dilimpahkan Kicen Adnyana Berharap Usut Keterlibatan Orang Pusat

**Denpasar (Bali Post) -**

Kasus dugaan penipuan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan tersangka mantan anggota DPRD Klungkung I Wayan Kicen Adnyana yang kini mendekam di penjara akibat terjerat kasus korupsi lainnya kini memasuki babak baru. Berkas perkaranya telah dilimpahkan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung, Selasa (21/8) pagi.

Proses pelimpahan tersebut

berlangsung cukup lama. Kasat Reskrim Polres Klungkung AKP I Made Agus Dwi Wirawan mengatakan, karena ada sejumlah hal yang harus dipenuhi. "Sekarang sudah P-21 (lengkap - red). Jadinya langsung dilimpahkan. Termasuk disertakan barang bukti berupa kuitansi pembayaran dari pelapor," ungkapnya.

Seperti diketahui, Kicen Adnyana yang berasal dari Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2017. Ia dipolisikan karena diduga

melakukan penipuan terhadap warga asal Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Bangli, I Wayan Suda. Anaknya dijanjikan lolos CPNS di salah satu rumah sakit di Denpasar pada 2015 dengan menyeter uang Rp 175 juta.

Namun, hal tersebut tak terpenuhi. Saat dimintai keterangan oleh salah satu jaksa, Kicen Adnyana yang diboyong dari Rumah Tahanan (Rutan) Klungkung nampak tenang dan cukup kooperatif. Di balik status yang disandanginya kini, ia juga melaporkan

salah satu orang dari pemerintah pusat yang menjanjikan untuk memberikan jatah CPNS ke Polda Bali. Kuasa hukum Kicen Adnyana, Anak Agung Gede Parwata, menyatakan kliennya itu mengikuti jalannya proses hukum. "Kami mengikuti prosesnya," jelasnya. Sementara itu, Kasi Pidana Umum Kejari Klungkung Bambang Wahyu menyatakan, pascapelimpahan akan dilakukan penelitian terhadap berkas, sebelum nantinya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Klungkung. (kmb45)

Edisi : KAMI, 23 Agustus 2018

Hal : 12



Sempat Ditertibkan

# Penambang Liar di Eks Galian C Kembali Marak



Bali Post/505

Semarapura (Bali Post) -

Penambangan pasir di eks galian C Kabupaten Klungkung yang sempat ditertibkan tim yustisi, kembali marak. Para penambang terlihat melakukan aktivitas penggalian di bawah jembatan Jalan By-pass Ida Bagus Mantra pada Rabu (22/8) kemarin. Penggalian itu dilakukan secara manual. Pasir yang merupakan material erupsi Gunung Agung, Karangasem selanjutnya diangkut ke truk.

Aktivitas tersebut sempat mendapat sorotan dari Sekretaris Komisi II DPRD Klungkung I Wayan Buda Parwata. Ia meminta tim yustisi untuk bertindak tegas melakukan penertiban. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengamankan aset pemerintah. "Ini harus ditindak tegas," ungkapnya.

Wakil rakyat asal Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan ini menegaskan, penertiban juga tak lepas dari peraturan pemerintah yang melarang adanya ak-

tivitas penambangan di kawasan tersebut. "Harus ditindaklanjuti dan ada langkah cepat. Apalagi sudah dinyatakan ditutup. Sekarang seperti ada pembiaran," ucapnya.

Tak hanya itu, tim yustisi juga sempat turun ke lokasi, sekaligus memastikan dampak pelayangan surat peringatan untuk berhenti melakukan penambangan. Saat itu, Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Klungkung I Komang Agus Putra San-

jaya menegaskan untuk terus melakukan patroli. Pemasangan portal pada akses masuk juga diwacanakan, namun fakta di lapangan, itu belum ada. "Setiap pagi ada anggota patroli ke sini. Ini akan terus kami intensifkan," sebutnya kala itu. Guna memberikan efek jera, petugas juga sempat mengamankan sejumlah peralatan penambangan.

Dikonfirmasi terpisah, Kasatpol PP dan Pemadam Kebakaran Klungkung I Putu Suarta tak menampik pelaku penggalian masih kucing-kucingan. Pihaknya pun telah koordinasi dengan Satpol PP Provinsi Bali untuk bersama-sama turun ke lokasi. "Perda Klungkung sanksinya hanya pembinaan. Kalau provinsi bisa dikenakan tipiring. Kami segera turun," sebutnya. (kmb45)

Edisi : Kamis, 23 Agustus 2018

Hal : 12



Gagal Dapat Dana APBN Rp 100 Miliar

## Revitalisasi Pasar Banyuasri Didanai APBD Murni

Singaraja (Bali Post) -

Program revitalisasi Pasar Banyuasri, Kecamatan Buleleng gagal dilakukan dengan memanfaatkan dana bantuan dari APBN Tahun 2018. Pasalnya dari usulan dana maksimal Rp 100 miliar, ternyata hanya disetujui Rp 6 miliar.

Lantaran dana yang disetujui di bawah kebutuhan maksimal, Pemkab Buleleng memutuskan untuk merevitalisasi pasar tradisional terbesar kedua di Bali Utara itu memanfaatkan dana APBD murni secara bertahap hingga tiga tahun anggaran.

Mengetahui dana revitalisasi Pasar Banyuasri di bawah kebutuhan maksimal, Dinas Perdagangan Perindustrian (Disdagprin) Buleleng tahun ini telah menyusun *Detail Engineering Design* (DED). Dokumen awal ini ditargetkan rampung September 2018 mendatang. Selanjutnya, tahap awal lewat APBD Induk 2019 mendatang, Pemkab Buleleng mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar untuk membangun struktur bangu-

nan fisik Pasar Banyuasri. Tahapan berikutnya, pemkab mengalokasikan anggaran tahap dua dan ketiga sampai proyek revitalisasi untuk menyulap Pasar Banyuasri menjadi pasar semimodern itu dikerjakan tuntas seratus persen dengan dana APBD murni.

Kepala Disdagprin Buleleng Ketut Suparto, Senin (20/8) kemarin mengatakan, walau bantuan dana ke APBN tidak memenuhi kebutuhan maksimal, namun kebijakan pemerintah daerah tidak putus di tengah jalan. Ini karena pemerintah daerah tidak ingin program pembangunan seperti revitalisasi pasar ini disebut "proyek akan" alias hanya diwacanakan. Untuk itu, dengan komitmen mewu-

judkan infrastruktur pasar semimodern di tengah Kota Singaraja, pemerintah daerah tetap merevitalisasi Pasar Banyuasri dengan pola bertahap. "Setelah kita ajukan itu memang disetujui Rp 6 miliar dari kebutuhan maksimal Rp 100 miliar. Kebijakan pemerintah daerah tidak ingin program ini hanya wacana, sehingga seratus persen revitalisasi dibiayai dari APBD," katanya.

Menurut mantan Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Sekab Buleleng ini, sesuai dengan DED yang sudah disusun pada tahun ini, revitalisasi akan dilakukan bertahap sampai tiga kali anggaran. Pertama, tahun 2019 mendatang dialokasikan Rp 50 miliar. Dana

Edisi : Selasa, 21 Agustus 2018

Hal : 8



sebesar itu untuk membiayai pembangunan struktur gedung pasar. Selanjutnya, pada tahun 2020 kembali pemkab akan mengalokasikan anggaran untuk tahap dua. Jika nanti ketersediaan anggaran melebihi dari tahap pertama, bisa saja revitalisasi dituntaskan hanya dengan dua kali anggaran. Namun jika tidak, maka target penuntasan revitalisasi sampai tahun 2021 mendatang.

Selama proyek revitalisasi, ribuan pedagang di Pasar Banyuasri akan dipindahkan ke lokasi pasar darurat. Saat ini, Disdagprin bersama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Buleleng telah mengkaji sejumlah lokasi pasar darurat. Dari skema awal, pedagang akan berjualan sementara mulai dari areal Terminal Banyuasri dan di badan Jalan Samudra dan sekitarnya. "Dulu waktu revitalisasi pas-capasar terbakar kan pernah

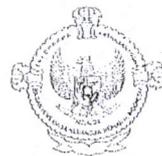
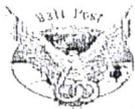
kita relokasi ke areal terminal dan Jalan Samudra. Nah nanti dalam revitalisasi kembali kita siapkan pasar darurat di lokasi tersebut," jelasnya.

#### Pasar Sumberkima

Sementara soal kucuran dana APBN yang tadinya telah disetujui untuk revitalisasi Pasar Banyuasri dialihkan untuk membiayai revitalisasi Pasar Tradisional Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak. Pasar di ujung barat Buleleng itu akan dibangun dengan menghabiskan anggaran Rp 6 miliar. Proyek ini sudah masuk tahap pengumuman lelang di Bagian Layanan Pengadaan (BLP) barang dan jasa dan dipastikan dalam waktu dekat ini, proyek akan mulai dikerjakan. Revitalisasi pasar desa ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang terus menggenjot revitalisasi infrastruktur pasar desa. (kmb38)

Edisi : \_\_\_\_\_

Hal : \_\_\_\_\_



Pendataan Lahan di Eks Galian C

Lama Tak Tuntas, Pemkab Didesak Lakukan Percepatan

Semarapura (Bali Post) -

Pendataan kepemilikan lahan di eks galian C Klungkung belum tuntas. Padahal prosesnya sudah berjalan selama bertahun-tahun. Hal ini menjadi sorotan kalangan legislatif. Ketua Komisi II DPRD Klungkung I Komang Suantara mendesak pemkab untuk melakukan percepatan.

"Ini sudah berjalan sejak lama. Termasuk dalam kepemimpinan Bupati Suwirta pada periode pertama juga dilaksanakan. Tetapi belum tuntas. Kami mendesak supaya segera diselesaikan," ungkapnya usai rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Klungkung, Senin (20/8) kemarin.

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyatakan saat adanya banjir lumpur yang membawa material erupsi Gunung Agung akhir 2017, lahan di eks galian C yang luasnya hampir 300 hektar itu banyak yang berubah. Oleh sebab itu, Pemkab dinilai perlu merekonstruksi ulang dan secara komprehensif. "Mana yang menjadi milik masyarakat, kabupaten, provinsi dan sitaan kejaksaan. Ini harus

ditentukan. Juga perlu dimusyawarahkan. Termasuk dengan pemerintah desa yang ada di sekitarnya karena itu menyangkut juga dengan perbatasan," jelasnya.

Guna menghindari penyimpangan, dalam pendataan tersebut, pemkab diharapkan bisa menggandeng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) yang di dalamnya terdapat lembaga hukum. "Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah siap dengan data dan sistem. Sekarang tinggal keseriusan pemkab saja," ucapnya.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta sempat melontarkan wacana untuk menjadikan eks galian C itu sebagai objek wisata berskala besar. Secara otomatis, itu akan mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Berangkat

dari hal tersebut, kejelasan kepemilikan lahan sangat penting. "Investasi akan datang jika status (eks galian C - red) jelas. Kalau tidak maka akan sulit masuk," imbuh Suantara.

Sementara itu, Kepala DLHP Klungkung Anak Agung Kirana menyampaikan peta desain perencanaan untuk pendataan lahan di lokasi itu sudah ada pada 2016. Namun, karena pada 2017 ada pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, pihaknya tidak mendapat alokasi anggaran sehingga apa yang direncanakan belum bisa berjalan. "Jadinya kami hanya sebatas sosialisasi ke masyarakat terkait ke pemetaan. Erupsi Gunung Agung juga menyebabkan penundaan. Soal pensertifikatan, sepenuhnya ada di BPN," terangnya. (kmb45)

Edisi : Selasa, 20 Agustus 2018

Hal :



## Kasus Dugaan Suap ASN

### Soal Vonis Tujuh Bulan, Jaksa Nyatakan Menerima

Denpasar (Bali Post) -

Majelis hakim pimpinan Made Sukerani dalam putusan kasus dugaan suap atau gratifikasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), terkait perubahan bendera kapal asing, pekan lalu memberikan waktu sepekan kepada terdakwa dan jaksa dalam menyikapi putusan majelis hakim. JPU Wayan Suardi yang dikonfirmasi soal menerima atau menempuh upaya hukum banding dalam putusan 7 bulan atas perkara korupsi ini, Minggu (19/8) kemarin, menyatakan menerima putusan majelis hakim tersebut. Sehingga perkara dugaan suap pengurusan bendera kapal asing ke bendera Indonesia (Dream Bali) itu sebentar lagi akan *inkracht*. "Jaksa terima," ucap Wayan Suardi.

Sebelumnya, dalam perkara dugaan suap terhadap ASN, majelis hakim pimpinan Made Sukerani menghukum terdakwa Adi Wicaksono dengan pidana penjara selama tujuh bulan, denda Rp 35 juta subsidi dua bulan kurungan. Putusan majelis hakim ini adalah putusan paling rendah sepanjang sidang pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Denpasar. Sedangkan rekannya, Direktur PT Bali Marine Service Rustyasi Pilemon (32), dihukum pidana penjara se-

lama satu tahun dan denda Rp 50 juta. "Jika tidak dibayar setelah kasus ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan," vonis hakim.

Atas vonis tersebut, Adi Wicaksono langsung bersujud. Begitu juga dengan Pilemon yang langsung memeluk keluarganya begitu hakim ketok palu.

Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dalam Pasal 13 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor.31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sebagaimana diketahui, kedua terdakwa diadili atas dugaan suap dan gratifikasi terkait pemalsuan dokumen kapal dari Dream Tahiti berbendera Prancis menjadi Dream Bali. Sebagai penerima suap adalah oknum ASN di Pelabuhan Benoa dan Tanjungwangi. Sebelumnya dalam dakwaan disebutkan bahwa perbuatan kedua terdakwa dianggap telah merugikan keuangan negara dengan hilangnya hak negara dari

pendapatan pajak impor kapal Dream Tahiti/Dream Bali sebesar Rp 1.096.449.000.

Kasus ini berawal dari pembelian kapal berbendera Prancis oleh saksi Ni Made Sumbersari dan Michel Malo Menager melalui Loic Bonnet pemilik perusahaan Archipel Croisieres di Prancis seharga USD 80.000. Kemudian dua saksi tersebut mendatangi terdakwa Rustyasi Palemon selaku Direktur Agent Isle Marine untuk mengurus perubahan bendera kapal dari Prancis menjadi Indonesia.

Terdakwa Palemon menghubungi terdakwa Wicaksono selaku kapten kapal *freelance* untuk menyelesaikan proses perubahan bendera tersebut.

Wicaksono menjalin komunikasi dengan Joni Edy Susanto (terpidana dalam kasus yang sama) selaku PNS kantor KSOP Benoa, yang kemudian disanggupinya dengan bantuan almarhum Heru Supryadi selaku PNS di kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Berbekal dokumen palsu itulah, Dream Tahiti yang kemudian berubah nama menjadi Dream Bali beroperasi selama dua tahun dengan rute pelayaran di perairan Bali-Lombok, Serangan-Nusa Penida, dan Nusa Lambongan. (kmb37)

Edisi : Senin, 20 Agustus 2018

Hal : 5



## Dugaan Kasus Pungutan Retribusi Objek Wisata BPKP Lakukan Audit Kerugian Negara

Amlapura (Bali Post) -

Petugas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turun ke Karangasem, melakukan audit investigasi kerugian negara terkait dugaan kasus pungutan retribusi di sepuluh objek wisata di Karangasem. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karangasem I Nyoman Sucitrawan, Jumat (17/8) kemarin.

Jumlah anggota tim yang melakukan audit investigasi itu kata Sucitrawan, sebanyak lima orang. Dari jumlah itu, hanya tiga orang yang turun. Mereka menggelar audit investigasi sejak tiga hari lalu. Sejak Kamis lalu, malah sudah kembali. Audit investigasi itu dilakukan untuk menghitung kerugian negara. Ada dugaan terjadi kerugian kasus pungutan retribusi di sepuluh objek wisata itu. Tim telah menyisir beberapa objek. Dalam waktu dekat, kemungkinan BPKP akan mengumumkan berapa kerugian negara.

"Sekarang belum bisa diketahui berapa besar kerugian negara itu. Dalam waktu dekat ini, pasti keluar hasil audit BPKP. Untuk dokumen dan berkas lainnya sudah memenuhi syarat. Kita tunggu nominal kerugiannya," ungkap Sucitrawan.

Pihaknya telah mengantongi nama tersangka jika ada kerugian negara pada dugaan kasus pungutan retribusi di sepuluh objek. Hanya, belum berani membeberkan nama-nama itu karena belum keluar audit BPKP terkait berapa kerugian negara akibat kasus ini.

"Kita tunggu saja. Mungkin masih dihitung angkanya. Proses perhitungan memang agak lama, sebab objek wisata yang diperiksa itu banyak. Setelah ada kerugian, lalu pemeriksaan digelar lagi," katanya.

Untuk diketahui, kasus ini mulai didalami sejak 2017. Bermula kasus operasi tangkap tangan (OTT) petugas pungut uang retribusi di objek wisata Tulamben, oleh Tim Saber Pungli. Dalam sidang di Tipikor, petugas pungut itu menjelaskan hampir semua menerapkan cara yang sama. Setelah diselidiki ternyata benar adanya. Tiket yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata, tidak sesuai dengan angka pemasukan di Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karangasem. Jumlah tiket yang terjual dengan pemasukannya tidak *balance* (seimbang). Karena ada kejanggalan, maka itu Kejari menyelidiki pungutan retribusi tahun 2011 - 2016. Petugas sudah mengumpulkan data, surat, dan berkas. Kejari telah memeriksa sekitar 15 orang saksi, terkait kasus ini. Mulai dari petugas pungut, hingga pejabat Dispar Karangasem. (kmb41)

Edisi : Sabtu 18 Agustus 2018

Hal : \_\_\_\_\_



## Peringati Hari Kemerdekaan RI

# Pemkab Kucurkan Anggaran Rp 1,8 Miliar

Semarang (Bali Post) -

Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah masuk sebagai agenda tahunan Pemkab Klungkung. Khusus untuk tahun ini anggaran yang dikucurkan tak tanggung-tanggung, mencapai Rp 1,8 miliar.

Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta yang juga Ketua Panitia Tetap, Jumat (10/8) kemarin, mengungkapkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, besaran anggaran kali ini nyaris tak ada perubahan. Itu digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan, mulai dari gerak jalan, sepeda hias, karnaval, santunan kepada veteran dan hiburan rakyat.

"Untuk anggaran hampir

sama dengan sebelumnya," ungkapnya didampingi Sekda Klungkung I Gede Putu Winatra. Pada peringatan ke-73 ini, ada pemandangan berbeda yang nantinya terlihat di bumi serobotan. Saat Detik-detik Proklamasi pada 17 Agustus, seluruh banjar diimbau untuk *nepak kulkul* (memukul kentongan) secara bersamaan dengan irama *banban* (lambat).

Hal ini sudah dikoordinasikan dengan Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) untuk bisa disosialisasikan. "Ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kami ingin mengingatkan masyarakat bahwa 17 Agustus menjadi peringatan Hari Kemerdekaan. Kalau untuk kegiatan lain masih sama dengan sebelumnya," ucapnya,

Mantan Perbekel Desa Akah Kecamatan Klungkung ini mengharapkan momentum tahunan ini bisa membangkitkan semangat perjuangan, yang nantinya bisa berimbas pada percepatan pembangunan daerah. "Kami ingin sikap nasionalisme masyarakat semakin meningkat," sebutnya. Ditambahkan, kegiatan yang dilaksanakan akan dievaluasi.

Ke depan akan dipermanis dengan hal-hal lain yang sifatnya inovatif. "Tahun selanjutnya semoga bisa ada kegiatan lain, seperti napak tilas," imbuhnya.

Sementara itu, khusus untuk pelaksanaan lomba, sudah mulai sejak 7 Agustus. Ini pun mendapat sambutan hangat dari masyarakat. (kmb45)



Bali Post/sos

LOMBA - Lomba gerak jalan meramaikan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-73 di Kabupaten Klungkung. Pemkab mengalokasikan anggaran untuk seluruh kegiatan mencapai Rp 1,8 miliar.

Edisi : Sabtu, 11 Agustus 2018

Hal : 12



## Beasiswa Berprestasi

# Rp 2 Miliar Lebih Diberikan kepada 834 Mahasiswa

SEBANYAK 834 mahasiswa berprestasi asal Jembrana mendapatkan beasiswa yang diserahkan langsung Bupati Jembrana I Putu Artha didampingi Wakil Bupati Made Kembang Hartawan, Forkominda dan jajaran OPD Kabupaten Jembrana di Gedung Kesenian Bung Karno (GKBK), Jumat (10/8). Penyerahan beasiswa semacam ini dilakukan dua kali dalam setahun. Penyerahan beasiswa ini merupakan yang pertama untuk periode Januari-Juni 2018 dengan anggaran mencapai Rp 2.502.000.000.

Program beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa ber-KTP Jembrana yang kuliah di Universitas/Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta yang berakreditasi A. Dengan syarat memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,3 untuk Fakultas Umum dan 3,0 untuk Fakultas Kedokteran dan Teknik. Jumlah beasiswa sebesar Rp 500 ribu per bulan atau Rp 3 juta per semester.

Bupati Artha menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada mahasiswa Jembrana yang sudah menunjukkan prestasinya.

Dengan demikian, Pemkab Jembrana dan orangtua tidak sia-sia mengeluarkan dana untuk biaya kuliah. Dia berharap beasiswa yang diperoleh dimanfaatkan secara tepat dan bijak untuk memenuhi kebutuhan kuliah. Selain itu, dia berpesan kepada para mahasiswa untuk membantu pengembangan pariwisata Jembrana melalui promosi di lingkungan pendidikannya.

"Manfaatkan dengan baik beasiswa yang diperoleh. Jangan sampai dipakai hal-hal negatif. Jagalah nama baik Jembrana semasa mengenyam pendidikan. Selain itu harapan saya agar adik-adik bisa membantu mempromosikan pariwisata dan budaya Jembrana kepada teman-teman kampusnya," ucap Bupati Artha.

Dalam kesempatan itu, Wabup Kembang Hartawan juga berpesan agar para mahasiswa memiliki rasa nasionalisme yang tinggi serta bangga menjadi warga Jembrana. "Kita harus bangga dengan Jembrana. Adik-adik juga harus ikut membela apabila ada berita *hoax* atau tidak benar di luar tentang Jembrana," terang Kembang.

Edisi : Sabtu, 11 Agustus 2018

Hal : 10



Bali Post/ist

**BEASISWA - Bupati Jembrana I Putu Artha didampingi Wabup Made Kembang Hartawan dan Forkopinda saat menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi asal Jembrana.**

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jembrana Eka Suarnama menjelaskan 834 mahasiswa ini berasal dari

hasil seleksi dari 1.132 orang. Dari seleksi tersebut 943 orang dinyatakan memenuhi syarat, namun 109 lainnya tidak bisa menerima beasiswa karena

keterbatasan anggaran. "Dari 943 itu kami rangking. Anggaran hanya mampu memberikan beasiswa kepada 834 orang saja," ujar Suarnama. (ad523)

Edisi : Sabtu, 11 Agustus 2018.

Hal : 10



## Penyuap ASN Divonis Ringan

### Denpasar (Bali Post) -

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar mencetak rekor baru dalam menghukum terdakwa korupsi. Dalam perkara dugaan suap terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), majelis hakim pimpinan Made Sukerani menghukum terdakwa Adi Wicaksono dengan pidana penjara selama tujuh bulan, denda Rp 35 juta subsidi dua bulan kurungan.

Putusan majelis hakim ini adalah putusan paling rendah sepanjang sidang pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Denpasar. Sedangkan rekannya, Direktur PT Bali Merine Service, Rustyasi Pilemon (32) dihukum pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 50 juta. "Jika tidak dibayar setelah kasus ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan," vonis hakim.

Atas vonis tersebut, Adi Wicaksono langsung bersujud. Begitu juga dengan Pilemon yang langsung memeluk keluarganya begitu hakim usai mengetokkan palu.

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa. JPU Wayan Suardi sebelumnya di Pengadilan Tipikor Denpasar menuntut Direktur PT Bali

Merine Service, Rustyasi Pilemon (32) dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan Adi Wicaksono dengan pidana penjara selama sepuluh bulan. Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dalam Pasal 13 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Seperti diberitakan sebelumnya, kedua terdakwa tersebut diadili atas dugaan suap dan gratifikasi terkait pemalsuan dokumen kapal dari Dream Tahiti berbendera Perancis menjadi Dream Bali. Sebagai penerima suap adalah oknum ASN di Pelabuhan Benoa dan Tanjungwangi. Sebelumnya dalam dakwaan disebutkan bahwa perbuatan kedua terdakwa dianggap telah merugikan keuangan negara dengan hilangnya hak negara dari pendapatan pajak impor kapal Dream Tahiti/Dream Bali sebesar Rp 1.096.449.000.

Kasus ini berawal dari pembelian kapal berbendera Perancis oleh saksi Ni Made Sumbarsari dan Michel Malo Menager melalui Loic Bonnet pemilik perusahaan Archipel Croisieres di Perancis seharga USD 80.000. Kemudian dua saksi tersebut mendatangi terdakwa Rustyasi Pilemon selaku Direktur agent Isle

Marine untuk mengurus perubahan bendera kapal dari Perancis menjadi Indonesia.

Terdakwa Pilemon menghubungi terdakwa Wicaksono selaku kapten kapal *Freelance* untuk menyelesaikan proses perubahan bendera tersebut. Wicaksono menjalin komunikasi dengan Joni Edy Susanto (terpidana dalam kasus yang sama) selaku PNS kantor KSOP Benoa, yang kemudian disanggupinya dengan bantuan almarhum Heru Supryadi selaku PNS di Kantor Otiritas Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi.

Berbekal dokumen palsu itulah Dream Tahiti yang kemudian berubah nama menjadi Dream Bali beroperasi selama dua tahun dengan rute pelayaran di perairan Bali-Lombok, Serangan-Nusa Penida, dan Nusa Lembangan.

Setelah proses pembuatan dokumen palsu itu selesai, pemilik kapal yang juga saksi dalam perkara ini Ni Made Sari dan Eric Michel Malo Menager menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada terdakwa Pilemon. Oleh terdakwa Pilemon, uang tersebut kemudian ditransfer ke terdakwa Adi Wicaksono sebesar Rp 160 juta. Dari Adi Wicaksono, uang sebesar Rp 160 juta itu ditransfer lagi ke Jony Edy Susanto sebesar Rp 47 juta dan secara tunai diserahkan sebanyak dua kali. Terdakwa Adi Wicaksono juga mentransfer uang sebesar Rp 50 juta kepada almarhum Heru Supriyadi. (kmb37)

Edisi : Kamis, 9 Agustus 2018

Hal : 2



## Bakeuda "Sisir" Potensi Wajib Pajak Baru

Tabanan (Bali Post) -

Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) harus bekerja ekstra keras untuk menutupi defisit APBD 2018. Apalagi ada desakan dewan agar defisit tersebut bisa segera ditutupi dengan cara apapun. Terkait hal tersebut, Bakeuda kini "menyisir" wajib pajak baru untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Sekretaris Bakeuda Tabanan Ni Wayan Maryati menyampaikan, sejumlah upaya akan dilakukan untuk bisa meningkatkan raihan pendapatan, salah satunya menyisir potensi wajib baru. Ada pajak hotel 14 titik, restoran sembilan titik dan hiburan dua titik. "Setelah ditetapkan sebagai wajib pajak, baru akan dilakukan pemungutan. Target September, karena dari ketentuan perda, usaha yang mendapatkan penghasilan di atas Rp 5 juta per bulan, wajib ditarik retribusi pajak," ucapnya, Rabu (8/8) kemarin.

Tak hanya itu, Bakeuda juga akan melakukan perampungan pajak dengan menggandeng pihak ketiga (Udayana), sasarannya ada 15 wajib pajak hotel restoran. Jumlah tersebut berdasarkan realisasi yang ada dibandingkan dengan potensi yang mereka miliki. "Misalnya usaha tersebut secara kasat mata terlihat ramai, namun saat pembayaran pajak tidak signifikan, maka akan kita

audit kembali," terangnya.

Upaya lainnya juga segera melakukan pemasangan *typing system* untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak untuk mempercepat dan mempermudah proses layanan pajak, dan mempermudah pengawasan dan pengendalian. "Ada 20 *typing system* yang akan kita pasang untuk restoran dan hotel," ucapnya.

*Typing system* ini yakni sistem pajak *online* yang terintegrasi, mulai dari perekaman data transaksi penjualan, mengolah data menjadi pelaporan, selanjutnya terintegrasi dengan center control dan dengan pembayaran ke bank.

Terakhir mengoptimalkan pemungutan kepada pengusaha yang melaksanakan usaha yang tidak memenuhi izin. "Usaha yang sudah berjalan dan menghasilkan omzet di atas Rp 5 juta sebulan, meski tidak mengantongi izin tetap akan kita pungut pajak sesuai Perbup yang mengatur tentang SOP pemungutan," tegasnya.

Di samping itu, mengoptimalkan pendataan dengan

melibatkan UPTD pendapatan di tiap kecamatan dengan menggandeng dinas terkait. "Kami sudah bersurat ke mereka untuk segera melakukan koordinasi," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, APBD Tabanan tahun 2018 telah berjalan sampai bulan Juli. Hingga pertengahan tahun anggaran, APBD Tabanan sudah mengalami defisit sebesar Rp 41 miliar akibat turunnya potensi pendapatan asli daerah (PAD). Dari jumlah tersebut, baru bisa ditutupi anggaran BKK provinsi sebesar Rp 10 miliar, sehingga masih ada defisit Rp 31 miliar.

Ini tentu saja membuat kalangan Dewan Tabanan dan eksekutif yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berusaha menyisir potensi pendapatan untuk bisa segera menutupi defisit tersebut. (kmb28)

**"Setelah ditetapkan sebagai wajib pajak, baru akan dilakukan pemungutan. Target September, karena dari ketentuan perda, usaha yang mendapatkan penghasilan di atas Rp 5 juta per bulan, wajib ditarik retribusi pajak."**

Sekretaris Bakeuda Tabanan  
Ni Wayan Maryati



Edisi : Kamis, 9 Agustus 2018

Hal : 7